

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

795871-1-TKBPRKA-R-A-20241231-010201-602563-30012025135403

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

metroasiamandiri@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-30 13:54:03



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI  
Posisi Laporan : 31 Desember 2024  
Alamat : JL. SOEKARNO HATTA NO.590, METRO INDAH MALL BLOK D  
16 BANDUNG  
Nomor Telepon : 227537668  
Penjelasan Umum : BPR telah melaksanakan sebagian besar penerapan tatakelola dengan baik dan dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	HERYANI	Direktur Utama	1.Menentukan kebijakan perusahaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan. 2.Menetapkan strategi Perusahaan secara menyeluruh dan mengukur kinerja dengan mengacu pada tujuan dan strategi perusahaan. 3.Bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perusahaan baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal. 4.Menjalankan pengurusan Perusahaan dan kegiatan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau petunjuk Dewan Komisaris maupun RUPS.
2	NUNIEK FENAWATI	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1.Menentukan kebijakan perusahaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan. 2.Menetapkan strategi Perusahaan secara menyeluruh dan mengukur kinerja dengan mengacu pada tujuan dan strategi perusahaan. 3.Bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perusahaan baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal. 4.Menjalankan pengurusan Perusahaan dan kegiatan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau petunjuk Dewan Komisaris maupun RUPS.

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

BPR menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian atau penyaluran kredit, diantaranya dengan melakukan survey serta cek lingkungan, melakukan penilaian sesuai kapasitas calon debitur, serta memberikan taksasi tidak melebihi kebijakan BPR.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	ROBY LASMANA	Komisaris Utama	1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan. 3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 4. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan serta mengikuti Perusahaan dan apabila terdapat gejala yang menunjukkan Perusahaan sedang dalam masalah, Dewan Komisaris akan segera meminta Direksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. 5. memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai tujuan strategis Perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggaran tahunan, laporan keuangan tahunan, penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal dan hal-hal penting lainnya.
2	CLARISSA WIJAYA	Komisaris	1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan. 3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 4. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan serta mengikuti Perusahaan dan apabila terdapat gejala yang menunjukkan Perusahaan sedang dalam masalah, Dewan Komisaris akan segera meminta Direksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. 5. memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai tujuan strategis Perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggaran tahunan, laporan keuangan tahunan, penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal dan hal-hal penting lainnya.

#### Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi agar lebih selektif lagi dalam pemberian penyaluran kredit sehingga kredit bermasalah dan rasio NPL bisa lebih diminimalisasi lagi.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2024

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HERYANI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	NUNIEK FENAWATI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HERYANI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	NUNIEK FENAWATI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	ROBY LASMANA	2.625.000.000	35,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ROBY LASMANA	PT Alenatex	5,00
2	ROBY LASMANA	PT Delimatex	5,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	ROBY LASMANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	CLARISSA WIJAYA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	ROBY LASMANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	CLARISSA WIJAYA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	558000000	2	276000000
2	Tunjangan	2	56391732	2	25697466
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		614391732		301697466

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

RUPS telah menetapkan struktur penggajian, tunjangan, fasilitas, tantiem untuk Komisaris dan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Sewa kendaraan dinas 2 unit mobil	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,70	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,43	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,08	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,31	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,13	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1. Gaji Direktur Utama sebesar 2.70 dibandingkan gaji pegawai terendah 2. Gaji Direktur Utama sebesar 1.43 dibanding gaji Direksi lainnya 3. gaji Dewan Komisaris memiliki perbedaan sebesar 1.08 dengan gaji Dewan Komisaris lainnya 4. Gaji Direktur Utama adalah sebesar 2.31 terhadap gaji Dewan Komisaris 5. Gaji Direktur Utama sebesar 3.13 dibanding gaji pegawai tertinggi. Dengan semakin besar gaji yang diberikan maka semakin besar pula tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	16-01-2023	2	Realisasi rencana bisnis semester 2 (per akhir Desember 2024), Pengawasan terhadap penyaluran kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, pemantauan terhadap kelancaran debitur dalam melakukan pembayaran angsuran, Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan Desember 2024.
2	08-05-2023	2	Melakukan penagihan secara intensif, meminimalisasi rasio Non Performing Loan ( NPL ) gross < 5 % atau di dalam batas yang sehat, Meningkatkan pertumbuhan kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, Meningkatkan pengawasan kredit, mulai dari permohonan kredit, pemrosean kredit, persetujuan kredit, dan pengikatan kredit sampai dengan pasca penyaluran kredit berupa pemantauan (monitoring), Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan ( NPL ) posisi bulan April 2024.
3	17-07-2023	2	Realisasi rencana bisnis semester 1 (per akhir Juni 2024) , melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan (NPL) dapat diminimalisasi ( gross < 5% atau didalam batas rasio yang sehat), Meningkatkan pertumbuhan kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, Meningkatkan pengawasan kredit, mulai dari permohonan kredit, pemrosean kredit, persetujuan kredit, dan pengikatan kredit sampai dengan pasca penyaluran kredit berupa pemantauan (monitoring), Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan ( NPL ) posisi bulan Juni 2024.
4	06-11-2023	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dan pasif terhadap operasional perbankan termasuk penerapan APU PPT, Pemantauan terhadap kelancaran debitur dalam melakukan pembayaran angsuran, membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan debitur agar dapat mendeteksi lebih dini kemungkinan timbulnya permasalahan, melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan ( NPL ) gross < 5 % atau di dalam batas yang sehat, Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan ( NPL ) posisi bulan Oktober 2024.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ROBY LASMANA	4	0	100,00
2	CLARISSA WIJAYA	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ditemukan Penyimpangan Internal

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR.

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2024

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA  
MANDIRI

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2024

### Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Pemberian dana untuk kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Nama BPR : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI  
Posisi Laporan : 31-12-2024  
Alamat : JL. SOEKARNO HATTA NO.590, METRO INDAH MALL BLOK D  
16 BANDUNG  
Nomor Telepon : 227537668  
Modal Inti BPR : 4.933.819.355,00  
Total Aset BPR : 43.204.495.030,00  
Bobot BPR : B  
Status Audit Ekstern : Diaudit  
Nilai Komposit : 1,9  
Peringkat Komposit : 2  
Analisis : Berdasarkan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR bahwa  
BPR telah melaksanakan sebagian besar penerapan tata kelola  
dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,67	0,70	0,20	1,57	0.314	BPR telah memiliki 2 (dua) anggota Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,80	0,20	1,56	0.234	BPR telah memiliki 2 komisaris
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0.300	BPR belum memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan namun tidak terdapat benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	1,12	0,33	2,45	0.245	BPR mempunyai Direktur kepatuhan, dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani sebagian kecil fungsi kepatuhan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,80	0,90	0,20	1,90	0.190	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur serta Audit intern diberikan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan audit intern
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	BPR telah menunjuk Audit Ekstern yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan cakupan hasil audit akuntan publik atau KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,74	0,10	1,34	0.134	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,80	0,25	1,55	0.116	Penyampaian laporan BMPK selalu tepat waktu dan BPR tidak ada yang melampaui BMPK tahun 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana bisnis dibuat dalam bentuk RKAT oleh komisaris dengan berpatokan pada visi dan misi BPR, dan telah disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan OJK.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,50	0,10	2,10	0.158	Laporan tahunan dan laporan publikasi telah ditandatangani oleh komisaris dan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki 2 (dua) anggota Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan surat OJK No. 179/KR.02/2018 Tgl. 4 Juli 2018 , No. 45/KR.02/2018 Tgl. 31 Januari 2018 dan No. 63/KR.02/2019 Tgl. 4 Maret 2019
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direksi masih menggunakan jasa konsultan Pajak
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan hasil pengawasan OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarakan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	anggota Direksi mampu mengimplementasikan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki tata tertib kerja Direksi
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah menyampaikan kebijakan strategis BPR kepada seluruh pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Direksi mensosialisasikan dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja di BPR terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Laporan tata kelola sudah dibuat Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Resiko kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR telah memiliki 2 komisaris berdasarkan surat dari BI No. 709/DPBPR/IDBPR/Bd Tgl. 12 Oktober 2005 dan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP 259/KR.02/2018 tgl. 21 September 2018
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi masing-masing 2 (dua) orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan komisaris telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan masa kepengurusan terakhir tercantum pada akta notaris No.01 tanggal 03 November 2021
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di tempat kedudukan BPR Metro Asia Mandiri yaitu di Bandung
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	1 (satu) anggota Dewan Komisaris merupakan anggota independent
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya termasuk anggota Direksi dan pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap tugas dan tanggung jawab kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dewan Komisaris senantiasa berusaha untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan komisaris melakukan pemantauan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Bagian atau Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kerjanya masing-masing
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris berdomisili di tempat kedudukan BPR Metro Asia Mandiri sehingga waktu dan kesempatan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	keputusan Komisaris sebagian besar diambil secara musyawarah
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris tidak mengambil keuntungan untuk pribadi yang menimbulkan kerugian bagi BPR
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	BPR Metro Asia Mandiri sudah mempunyai direktur yang membawahi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR Metro Asia Mandiri memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	BPR Metro Asia Mandiri memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan, tetapi tidak ada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	BPR Metro Asia Mandiri memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan, tetapi tidak ada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	BPR Metro Asia Mandiri sudah memiliki Direktur yang membawahi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	BPR Metro Asia Mandiri sudah memiliki Direktur yang membawahi kepatuhan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR Metro Asia Mandiri telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif baru sebagian telah diterapkan dan dipenuhi dalam menjalankan fungsi kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR Metro Asia Mandiri sudah memiliki ketentuan intern satuan kerja kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	BPR Metro Asia Mandiri sudah memiliki Direktur yang membawahi kepatuhan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	BPR Metro Asia Mandiri sudah memiliki Direktur yang membawahi kepatuhan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	BPR Metro Asia Mandiri sudah memiliki Direktur yang membawahi kepatuhan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif baru sebagian kecil menangani fungsi kepatuhan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif baru sebagian kecil menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,12	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR Metro Asia Mandiri baru sebagian kecil dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	BPR Metro Asia Mandiri sudah memiliki Direktur yang membawahi kepatuhan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR Metro Asia Mandiri sudah memiliki Direktur yang membawahi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,33	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR Metro Asia Mandiri telah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	SPI baru memiliki program kerja untuk melaksanakan tugas audit intern
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	SPI merupakan unit kerja yang independent
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	SPI telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan audit intern
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Fungsi audit intern belum sepenuhnya diterapkan secara efektif pada seluruh aspek kegiatan usaha baik yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan bank dan masyarakat

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi pengawasan secara independent sudah cukup baik
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	SPI mendapatkan program pelatihan-pelatihan ketrampilan audit secara berkala
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	SPI melaporkan kegiatan dan temuan kepada Direktur Utama & Dewan Komisaris
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	SPI sudah melaporkan hal-hal yang dianggap temuan khusus kepada OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah melaporkan pengangkatan pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Aspek-aspek minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR merupakan akuntan publik yang terdaftar di otoritas jasa keuangan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Manajemen letter telah dilaporkan oleh akuntan publik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Manajemen letter dan hasil audit yang diberikan oleh akuntan publik dan KAP menunjukkan permasalahan BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit akuntan publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Risiko secara tertulis serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR sebagian besar telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR sebagian besar telah menerapkan sistem pengendalian intern
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sebagian besar telah menerapkan manajemen risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,74	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan mengirimkan mengenai Laporan Profil Risiko Semester ke II Tahun 2024 melalui Aplikasi Apollo kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada produk dan aktivitas baru yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki pedoman yang memadai terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR sebagian besar melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki BPR.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sudah cukup sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyampaian laporan BMPK selalu tepat waktu.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	BPR sudah melampaui BMPK tahun 2024.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis dibuat dalam bentuk RKAT oleh komisaris dengan berpatokan pada visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis didukung oleh pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan OJK.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis telah disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem informasi manajemen yang dimiliki telah lengkap, akurat dan tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah membuat laporan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah membuat laporan tahunan sesuai ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah cukup transparan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dalam penyajian laporan BPR berpedoman pada ketentuan OJK tentang transparansi kondisi keuangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan publikasi telah ditandatangani oleh komisaris dan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	BPR sudah melaporkan penanganan pengaduan nasabah.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI

TAHUN 2024

Bandung, 17 Januari 2025

Disetujui dan ditandatangani oleh:



---

Direktur Utama

Komisaris Utama

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI  
Alamat : JL.SOEKARNO HATTA NO.590, METRO INDAH MALL BLOK D-16 BANDUNG  
No Telp : 0227537668  
Posisi Laporan : TAHUN 2024  
Modal Inti : Rp. 4.933.819.355,-  
Total Aset : Rp. 43.204.495.030,-  
Status Audit : Di audit KAP  
Bobot BPR : Baik  
Nilai Komposit : 1,866  
Peringkat Komposit : 2

### KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2024 bahwa BPR telah melaksanakan sebagian besar penerapan tata kelola dengan baik.

Bandung, 17 Januari 2025

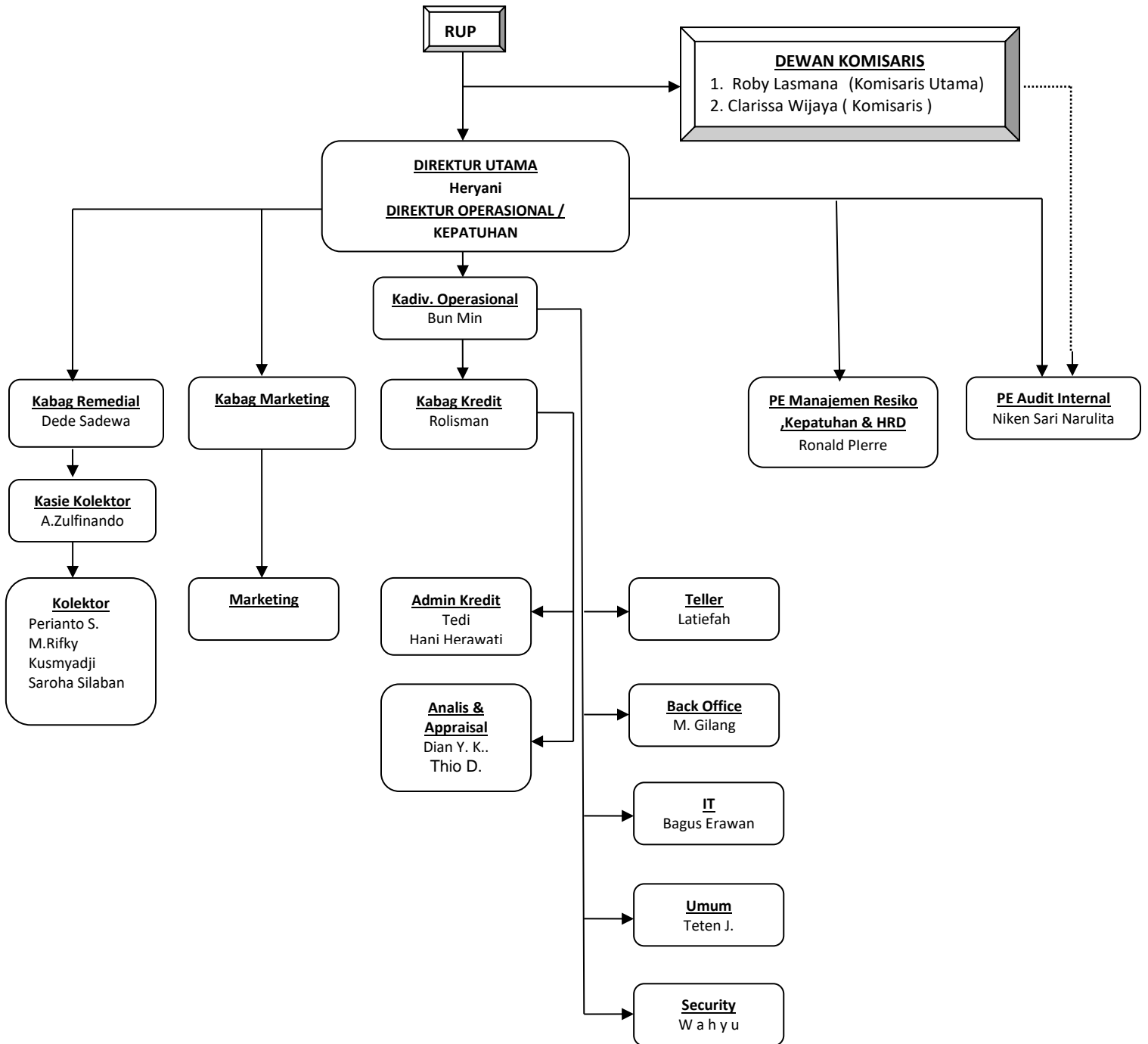
  
  
BPR  
METRO ASIA MANDIRI

Direktur Utama

Komisaris Utama

# Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi Kepatuhan BPR Metro Asia Mandiri 2024

## Struktur Organisasi PT. BPR Metro Asia Mandiri



## Formasi Sumber Daya Manusia

NAMA	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN	LAMA JABATAN
ADIANTA ZULFINANDO	KASIE KOLEKTOR	D3	5 Tahun 0 Bulan
BAGUS ERAWAN WIDHIAPUTRA	I T	S1	5 Tahun 4 Bulan
BUN MIN	KADIV OPERASIONAL	S1	6 Tahun 2 Bulan
CLARISSA WIJAYA	KOMISARIS	S1	5 Tahun 11 Bulan
DEDE SADEWA	PE KABAG REMEDIAL	SMK	5 Tahun 2 Bulan
DIAN YULIAN KUSWENDI	ANALIS & APPRAISAL	S1	6 Tahun 6 Bulan
HANI HERAWATI	ADMINISTRASI KREDIT	D3	6 Tahun 5 Bulan
HERYANI	DIRUT	S1	4 Tahun 4 Bulan
KUSMYADJI	KOLEKTOR	S1	4 Tahun 7 Bulan
LATIEFAH DINAR FIRMANSYAH	ACCOUNTING	S1	5 Tahun 7 Bulan
MOCHAMAD GILANG ABDUL KARIM	BACK OFFICE	SMA	5 Tahun 7 Bulan
MUHAMMAD RIFKY ABDUL HADI	KOLEKTOR	SMA	5 Tahun 10 Bulan
NIKEN SARI NARULITA	PE SPI	S1	6 Tahun 11 Bulan
NUNIEK FENAWATI	DIR OPS	S1	5 Tahun 10 Bulan
PERIANTO SITOMPUL	KOLEKTOR	SMA	17 Tahun 4 Bulan
ROBY LASMANA	KOMISARIS UTAMA	S2	5 Tahun 7 Bulan
ROLISMAN	KABAG KREDIT	S1	5 Tahun 10 Bulan
RONALD PIERRE	PE KEPATUHAN/ HRD	S1	12 Tahun 8 Bulan
SAROHA SILABAN	KOLEKTOR	SMA	3 Tahun 6 Bulan
TEDI, SE	ADMINISTRASI KREDIT	S1	3 Tahun 2 Bulan
TETEN JAMALUDIN	BAG UMUM	SMA	2 Tahun 5 Bulan
THIO DWIHERTANTO	ANALIS & APPRAISAL	D4	3 Tahun 2 Bulan
WAHYU	SECURITY	SMP	12 Tahun 8 Bulan

## Laporan Sosialisasi & Pelatihan

NO.	SOSIALISASI & PELATIHAN	BAGIAN	NAMA	TANGGAL PELAKSANAAN	NARA SUMBER
1	Sosialisasi POJK No.20 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit	HRD	Ronald	26/01/2024	Kepala Dept. Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan
2	Sosialisasi penyempurnaan Aplikasi Edabu versi 7.7	HRD	Ronald	30/01/2024	BPJS Kesehatan Cabang Bandung
3	Zoom : Penyampaian PJK mengenai Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT danatau/ PPSPM secara Individual Risk Assessment/IRA.	PE Kepatuhan	Ronald	20/02/2024	R. Rinto Teguh Santoso (Direktur APU PPT)

NO.	SOSIALISASI & PELATIHAN	BAGIAN	NAMA	TANGGAL PELAKSANAAN	NARA SUMBER
4	Sosialisasi : SAK-EP	Kredit & IT	Rolisman & Bagus	26/02/2024	PT USSI
5	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPU tahun 2024	PE Kepatuhan	Ronald	27/02/2024	Teguh Kurniawan KOJT; Judith Leona P. PPAK; Prio Anggoro DPRD; Wiwit Puspasari DPJK
6	Inhouse Trainig: Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPU tahun 2024	Seluruh Karyawan		25/03/2024	Ronald; Bun Min
7	Sosialisasi tentang Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan	Kadiv Operasional	BUN MIN	27/03/2024	OJK
8	Sosialisasi POJK No. 3 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan	PE Audit Internal	Niken Sarinarulita	17/05/2024	OJK
9	Team Building: Membangun kerjasama ...bisa...bisa...pasti bisa	Seluruh Karyawan		22/05/2024	Seluruh Karyawan
10	Kegiatan Bimbingan Teknis	Direktur & Staf IT	Nuniek & Bagus	4-5 Juni 2024	OJK
11	Zoom : Penyampaian PJK mengenai Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT danatau/ PPSPM secara Individual Risk Assessment/IRA.	PE Kepatuhan	Ronald	10/06/2024	PT USSI PPS
12	Webinar : Sosialisasi Rencana & Realisasi Literasi dan Inklusi	PE Kepatuhan	Ronald	25/06/2024	OJK
13	Persiapan Implementasi SAK-EP bagi BPR	Kabag Kredit	Rolisman	10/07/2024	OJK
14	Zoom : Sosialisasi Penghapusan Jaminan Fidusia	Kadiv Operasional & ManRisk	BUN MIN & Ronald	15/07/2024	Perbarindo
15	Zoom : Sosialisasi Penilaian Sendiri melalui sistem Si Peduli	Kadiv Operasional & ManRisk	BUN MIN & Ronald	16/07/2024	OJK
16	Sosialisasi Benefit Program Kemitraan BPJS Ketenagakerjaan	HRD	Ronald	13/09/2024	BPJS Ketenagakerjaan
17	Zoom : Sosialisasi Pelayanan SKCK	HRD	Ronald	20/09/2024	BPJS Kesehatan & Kepolisian
18	Zoom : Sosialisasi Ketentuan Perbankan	PE Kepatuhan; PE Audit	Ronald, Niken	07/11/2024	OJK
19	Sosialisasi Program Premi Penjaminan LPS	Direktur; Kadiv Ops'l	Nuniek & Bun Min	07/11/2024	Perbarindo
20	Optimalisasi Pemberitahuan Penghapusan Jaminan Fidusia Guna Terwujudnya Kepastian Hukum	Kabag Kredit & Kacab	Rolisman & Tedi	11/11/2024	Perbarindo
21	Sosialisasi APOLO modul Laporan Insidental dan Laporan Bulanan BPR/S	I T	Bagus	13-14/11/2024	OJK
22	Inhouse Training: Sosialisasi POJK No.22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen	Seluruh Karyawan		22/11 & 26/11 2024	Ronald; Bun Min
23	Zoom : Sosialisasi Sistem Indonesia Anti-Scam Center ( Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan	Kadiv Ops'l; IT	Bun Min; Bagus	15/11/2024	Perbarindo
24	Zoom : Sosialisasi Ketentuan BPR/S	Kadiv Ops'l; IT; PE Kepatuhan; PE Audit	Bun Min; Bagus; Ronald; Niken	08/11/2024	OJK

NO.	SOSIALISASI & PELATIHAN	BAGIAN	NAMA	TANGGAL PELAKSANAAN	NARA SUMBER
25	Zoom : Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi APU PPT (SIGAP) Tahun 2024	PE Kepatuhan	Ronald	04/12/2024	OJK
26	Zoom : Sosialisasi Edabu versi 7.10.0 Mutasi Non Aktif	HRD	Ronald	09/12/2024	BPJS Kesehatan
27	Zoom : DPLK Investment Update	HRD	Ronald	17/12/2024	Manulife
28	Inhouse Training : Sosialisasi Penerapan Strategi Anti Fraud	Seluruh Kabag		19/12/2024	Ronald; Bun Min
29	Webinar : Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Pelaporan Tahunan BPR/S dan Laporan Keuangan Publikasi BPR/S	Kadiv Ops'l & IT	Bun Min & Bagus	17/12/2024	OJK
30	Seminar Outlook Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2025, Mitigasi Dinamika Global dan Regional, Memastikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Direktur Utama	Heryani	20/12/2024	OJK

## Daftar Ketentuan Intern

NO.	NAMA SPO	TANGGAL PEMBERLAKUAN
1	KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PEDOMAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	15/08/2024
2	PERATURAN PERUSAHAAN	19/04/2024
3	PEDOMAN KEBIJAKAN KREDIT	18/09/2024
4	KEBIJAKAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL	2015
5	KEBIJAKAN DAN PROSEDUR AUDIT INTERNAL	13/12/2023
6	AKTIVA TETAP INVENTARIS	02/07/2018
7	IT	31/08/2018
8	PENGARSIPAN DOKUMEN	02/07/2018
9	MANAJEMEN KEPATUHAN	10/06/2019
10	PENGADAAN BARANG DAN JASA	10/06/2019
11	MANAJEMEN RISIKO	01/12/2022
12	SISTEM PELAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)	10/02/2022
13	PEDOMAN DAN KEBIJAKAN DAMPAK PENYEBARAN COVID-19	24/02/2023
14	PEDOMAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT BPR METRO ASIA MANDIRI	18/12/2023
15	PENYELENGGARAAN RENCANA PEMULIHAN BENCANA	10/04/2023

## Laporan Rencana Penyesuaian Ketentuan Intern

NO.	NAMA SPO	TANGGAL PEMBERLAKUAN
	NIHIL	

## Laporan Penerapan Fungsi Kepatuhan

NO.	BAGIAN	KETENTUAN INTERN	SESUAI : YA / TIDAK	KETERANGAN
1	Direktur Utama	Tata Kelola BPR	Ya	Sudah memiliki Direktur Utama
2	Direktur	Tata Kelola BPR	Ya	Sudah memiliki Direktur merangkap Direktur Kepatuhan

## Lap. Pemenuhan Struktur Organisasi/SDM

NO.	BAGIAN	STRUKTUR ORGANISASI / SDM	KONDISI 2024	PEMENUHAN
	NIHIL			

## Lap. Penyimpangan Terhadap Peraturan

NO.	TEMUAN	PERATURAN YANG MENGATUR	TGL TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Kekurangan pembentukan PPAP	POJK Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat	26/06/2024	sudah ditindak lanjuti, bukti kirim ke OJK tanggal 25/08/2024
2	Kesalahan Laporan Bulanan posisi 31 Mei 2024, 30 Juni 2024, 31 Juli 2024	SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2022	26/06/2024	sudah ditindak lanjuti, bukti kirim ke OJK tanggal 30/09/2024
3	Sanksi karena kesalahan pelaporan bulanan sebanyak 114 (seratus empat belas) item	Pasal 17 ayat (4) POJK Nomor 13/POJK.03/2019	26/06/2024	sudah ditindak lanjuti, bukti kirim ke OJK tanggal 05/09/2024

LAPORAN PEMENUHAN KOMITMEN

No.	Temuan	Komitmen kepada BI/OJK/LPS/PPATK	Batas Waktu	Penjelasan
1	<p>Hal yang perlu mendapatkan perhatian BPR antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum terdapat strategi kongkrit untuk meningkatkan bisnis utama BPR dalam bentuk kredit yang diberikan yang dalam 2 (dua) posisi pemeriksaan hanya meningkat sebesar Rp579.666 ribu (2,24%). Selain itu fungsi intermediasi BPR juga belum sepenuhnya optimal dengan LDR yang hanya sebesar 55,99%.</li> <li>b. Belum terdapat <i>action plan</i> kongkrit yang disertai dengan penetapan target penurunan secara bulanan dan <i>time line</i> penyelesaian. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kolektor sebanyak 5 (lima) orang dalam struktur organisasi belum dapat menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah BPR.</li> <li>c. BPR belum memastikan akurasi data laporan bulanan khususnya terkait dengan pelaporan sandi dalam <i>form</i> kredit yang diberikan dan agunan yang diberikan. Hal ini dapat berdampak pada kesalahan perhitungan PPAP BPR dan perhitungan modal inti BPR.</li> <li>d. BPR belum melakukan pemantauan secara periodik terkait dengan kebutuhan modal untuk pemenuhan modal inti s.d. Rp6 miliar.</li> <li>e. BPR belum melakukan pemantauan risiko inheren secara periodik dengan memperhatikan <i>risk tolerance</i> dan <i>risk appetite</i> BPR baik untuk risiko kredit, risiko operasional ataupun risiko kepatuhan.</li> <li>f. BPR belum melakukan evaluasi secara komprehensif untuk kinerja Kantor Cabang dengan kondisi penyaluran kredit yang stagnan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR akan menyusun strategi kongkrit untuk meningkatkan bisnis utama BPR dengan memperhatikan RBBPR Tahun 2024 dan 2025.</li> <li>b. BPR akan menyusun <i>action plan</i> kongkrit penyelesaian kredit bermasalah dan menjaga NPL &lt;5%.</li> <li>c. BPR akan melakukan <i>crash program</i> pengecekan laporan bulanan posisi Mei 2024 s.d. terkini.</li> <li>d. BPR akan memastikan modal inti minimum terpenuhi sesuai ketentuan yaitu Rp6 miliar. Dalam hal menurun BPR akan segera menyampaikan <i>action plan</i> kepada OJK untuk pemenuhan.</li> <li>e. BPR akan melakukan pemantauan risiko inheren secara triwulanan.</li> <li>f. BPR akan menyampaikan hasil evaluasi kinerja Kantor Cabang ke pada OJK termasuk penutupan Kantor Cabang dalam hal diperlukan.</li> </ul>	01/09/2024	BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting pada tgl. 30 Agst 2024
2	Melakukan evaluasi terhadap permasalahan BPR dan menetapkan strategi kongkrit dan penyesuaian dalam RBBPR Tahun 2024.	BPR akan melakukan evaluasi terhadap permasalahan BPR dan menetapkan strategi kongkrit dan penyesuaian dalam RBBPR Tahun 2024.	14/09/2024	BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting pada tgl. 12 Sept 2024
3	Melakukan evaluasi terhadap permasalahan BPR khususnya rentabilitas dan menetapkan strategi kongkrit dan penyesuaian dalam RBBPR Tahun 2024.	BPR akan melakukan evaluasi terhadap permasalahan BPR khususnya rentabilitas dan menetapkan strategi kongkrit dan penyesuaian dalam RBBPR Tahun 2024.	14/09/2024	BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting pada tgl. 12 Sept 2024

		BPR akan melakukan crash program akurasi data agunan dan kredit yang diberikan dalam Core Banking System (CBS).	31/08/2024	BPR telah melakukan crash program akurasi data agunan dan kredit yang terdapat dalam Core Banking System (CBS).
4	Mengevaluasi dan menyusun kembali struktur organisasi dan job description dengan memperhatikan seluruh ketentuan berlaku.	BPR akan menyesuaikan struktur organisasi dan job description.	31/12/2024	BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting pada tgl. 30 Des 2024
5	Menyampaikan perubahan nomenklatur sesuai dengan ketentuan.	BPR akan menyampaikan perubahan nomenklatur sesuai dengan ketentuan.	30/11/2024	BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting pada tgl. 13 Nov 2024
6	Melengkapi pemasaran produk sesuai ketentuan berlaku.	BPR akan melengkapi pemasaran produk sesuai ketentuan berlaku.	31/12/2024	BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting pada tgl. 29 Nov 2024
7	Menyesuaikan klausul dimaksud sesuai ketentuan ( Perlindungan Konsumen ).	BPR akan menyesuaikan klausul dimaksud sesuai ketentuan.	31/12/2024	BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting pada tgl. 29 Nov 2024
8	<p><b><u>Debitur a.n Yeni Nuraeni (No Rek 0013062431)</u></b></p> <p>a. Permohonan kredit debitur belum dilengkapi dengan tanda tangan debitur dan suami, data penghasilan, agunan, denah alamat rumah dan tempat usaha debitur serta informasi terkait usaha secara singkat.</p> <p>b. BPR diminta untuk menggunakan data SLIK dan bukan lagi BI <i>Checking</i></p> <p>c. Dalam analisis kredit, BPR menjelaskan adanya tunjangan sertifikasi untuk dokter dengan tanpa dasar mengingat dokter spesialis tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi melainkan tunjangan kelangkaan profesi (<i>guarantee fee</i>).</p> <p>d. Tidak terdapat bukti pembayaran atas biaya asuransi kebakaran yang dibayarkan debitur dan polis asuransi tidak tersedia di BPR.</p> <p><b><u>Debitur a.n Yuyun Setiawan (No Rek 0013062431)</u></b></p> <p>a. Belum terdapat bukti Pembayaran atas Biaya Asuransi Kebakaran yang dibayarkan Debitur, dan polis Asuransi.</p> <p>b. Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 3/2024 belum ditandatangani oleh PPAT</p> <p>c. Analisa kredit bagi debitur an. Yyun Setiawan menitikberatkan pada usaha yang dijalankan oleh Istri an. Yeni Nuraeni, sementara yang bersangkutan juga</p>	<p>BPR akan melengkapi hal tersebut di atas antara lain informasi dalam permohonan kredit dan buktipembayaran asuransi serta polis asuransi dan menyampaiannyakepada OJK.</p> <p>BPR akan melengkapi hal tersebut di atas antara lain bukti pembayaran asuransi serta polis asuransi dan informasi pendapatan atas sewa gedung kantor serta menyampaiannya kepada OJK.</p>	<p>30/11/2024</p> <p>30/11/2024</p>	<p>BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 29 Nov 2024</p> <p>Polis asuransi telah dilengkapipada tanggal 16 Agustus 2024.</p> <p>BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 29 Nov 2024</p> <p>Polis asuransi telah dilengkapi pada tanggal 16 Agustus 2024.</p>

<p>merupakan debitur pada BPR. Selain itu tidak terdapat analisis secara komprehensif yang memperhitungkan kedua fasilitas kredit tersebut.</p> <p>d. Pendapatan atas sewa gedung kantor dianggap sebagai pendapatan tambahan bulanan, sementara pembayaran sewa dilakukan pada tahun 2021.</p> <p><b><u>Debitur a.n. Wanti Septiany (No Rek 0023001581)</u></b></p> <p>a. Analisa kemampuan bayar debitur belum memadai, serta perhitungan pemberian kredit tidak sesuai dengan kebutuhan debitur.</p> <p>b. Restrukturisasi atas Perjanjian Kredit 128/PK/KMK/MAM-02/03/2020 tidak tercantum pada 540/PK/KMK/MAM-02/10/2023. Terdapat eksposur risiko dalam eksekusi Hak Tanggungan, mengingat SKMHT, APHT dan Perjanjian Kredit Notaril dari PPAT an. Yenny Dewi Martini belum diterima terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2023.</p> <p><b><u>Debitur a.n. Setio Hartono (No Rek 0013062434)</u></b></p> <p>a. Terdapat perbedaan pencatatan jaminan pada Surat Penegasan Pinjaman (SHM 597 an Yeni Nuraeni), dibandingkan dengan dokumen lainnya (SHM 1868 an Mey Suryawati).</p> <p>b. Analisis pemberian kredit modal kerja tanpa didukung survey yang memadai antara lain tidak terdapat kunjungan lokasi proyek jasa penarikan kabel tegangan menengah di daerah Kota Bandung yang dijadikan tujuan mengajukan kredit. PO yang dimiliki oleh debitur tidak dilengkapi dengan Kontrak dan SPK;</p> <p>c. Form Permohonan Kredit debitur belum dilengkapi data agunan, denah alamat rumah dan tempat usaha debitur, serta analisa singkat usaha</p> <p>d. Belum terdapat bukti Pembayaran atas Biaya Asuransi Kebakaran yang dibayarkan Debitur, dan polis Asuransi.</p> <p><b><u>Debitur a.n. Edi Prayitno (No Rek 0013062392)</u></b></p> <p>a. BPR diminta untuk menggunakan data SLIK dan bukan lagi BI Checking sebagaimana penjelasan</p>	<p>BPR akan menyampaikan dokumen yang menjelaskan pelunasan sebelum pencairan kredit dalam perjanjian tersebut.</p> <p>BPR akan melengkapi bukti dokumen tersebut dan menjelaskan perbedaan pencatatan jaminan kepada OJK.</p> <p>BPR akan melakukan evaluasi terhadap kredit tersebut dan menyampaikan kepada OJK.</p>	<p>30/11/2024</p> <p>30/11/2024</p> <p>30/11/2024</p>	<p>BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 29 Nov 2024</p> <p>Polis asuransi telah dilengkapi pada tanggal 16 Agustus 2024.</p> <p>BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 29 Nov 2024</p> <p>Polis asuransi telah dilengkapi pada tanggal 16 Agustus 2024.</p> <p>BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 29 Nov 2024</p>
---	---	---	--

	<p>dalam dokumen kredit.</p> <p>b. Analisis pemberian kredit modal kerja belum didukung dengan dokumen pendukung PO yang dimiliki oleh debitur tidak dilengkapi dengan Kontrak dan SPK;</p> <p>Terdapat perbedaan penetapan asuransi pada perjanjian kredit (tidak terdapat biaya asuransi) dan pada surat penegasan pinjaman (terdapat biaya asuransi).</p> <p><b><u>Debitur a.n. Yayan Hadian (No Rek 0013061094)</u></b></p> <p>a. Perlu adanya jalan keluar penyelesaian kredit bagi debitur, karena menunggu pembayaran dari PT. WIKA Realty. PT Wijaya Karya Persero (WIKAPERSERO) sendiri saat ini tengah dalam proses restrukturisasi Kementerian BUMN karena kondisi keuangan yang tidak sehat;</p> <p>b. Form Permohonan Kredit debitur belum dilengkapi data agunan, denah alamat rumah dan tempat usaha debitur, serta analisa singkat usaha</p> <p><b><u>Debitur a.n. Deden Kusnadi (No Rek 0013062111)</u></b></p> <p>a. Terdapat 2 dokumen Memorandum Analisa Kredit an Deden Kusnadi Nomor 046/MAK/MAM/III/2023 dengan penjelasan Tujuan Kredit yang berbeda.</p> <p>b. BPR belum memiliki kebijakan terkait kriteria agunan kredit tercermin dari adanya agunan yang kurang <i>marketable</i>.</p> <p><b><u>Debitur a.n. Nunung Juarsih (No Rek 0013061012)</u></b></p> <p>Form Permohonan Kredit debitur belum dilengkapi data agunan, denah alamat rumah dan tempat usaha debitur, analisa singkat usaha, serta tandatangan debitur dan pasangan;</p> <p><b><u>Penyelesaian Dokumen Legal Agunan di Notaris</u></b></p> <p>Masih terdapat pengikatan agunan yang belum terselesaikan di Notaris sejak tahun 2022 sebagaimana Surat Keterangan Nomor 35/Y/N/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.</p> <p>Selanjutnya BPR diminta untuk segera memantau penyelesaian pengikatan dimaksud termasuk penyelesaian dalam hal terdapat kendala yang dihadapi.</p>	<p>BPR akan menyampaikan rencana penyelesaian kredit debitur kepada OJK.</p> <p>BPR akan menyesuaikan dokumen pada Memorandum dan memiliki kebijakan tentang kriteria Agunan Kredit.</p> <p>BPR akan melengkapi hal tersebut dan menyampaikannya kepada OJK.</p> <p>BPR akan berkoordinasi dengan Notaris terkait penyelesaian dimaksud dan menyampaikannya kepada OJK.</p>	<p>30/11/2024</p> <p>30/11/2024</p> <p>30/11/2024</p> <p>30/11/2024</p>	<p>Polis asuransi telah dilengkapi pada tanggal 16 Agustus 2024.</p> <p>BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 29 Nov 2024</p> <p>BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 29 Nov 2024</p> <p>BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 29 Nov 2024</p> <p>BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 29 Nov 2024</p>
9	<p><b><u>Underlying Legal untuk Pengikatan Agunan Debitur Restrukturisasi</u></b></p> <p>Dalam proses restrukturisasi pengikatan agunan tidak</p>	<p>BPR akan melakukan penyesuaian hal tersebut.</p>	<p>30/11/2024</p>	<p>BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 29 Nov 2024</p>

	<p>dilakukan kembali oleh pengikatan agunan dengan maksud menggunakan HT pada saat awal perjanjian kredit. Namun demikian BPR tidak memperhatikan redaksional dalam perjanjian kredit restrukturisasi yang tidak didasarkan dalam perjanjian kredit sebelumnya. Sebagai contoh Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 1166 Tanggal 26 Februari 2020 merupakan restrukturisasi dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 Tanggal 5 Juli 2019, namun dalam akta addendum tidak disebutkan bahwa akta tersebut merupakan perubahan dari akta perjanjian kredit sebelumnya.</p> <p>Selanjutnya BPR diminta untuk menyesuaikan dan menjadi perhatian untuk berikutnya termasuk menyampaikan informasi kepada debitur.</p>			
10	Mengevaluasi dan menyusun kembali struktur organisasi dan job description dengan memperhatikan seluruh ketentuan berlaku.	BPR akan mengevaluasi dan menyusun kembali struktur organisasi dan <i>job description</i> dengan memperhatikan seluruh ketentuan berlaku.	31/12/2024	BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 30 Des 2024
11	<p><b><u>Kekurangan Pembentukan PPKA (d.h PPAP) Kredit Yang Diberikan</u></b> Pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) belum sesuai dengan POJK Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, yaitu terdapat kekurangan pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) per rekening kredit dengan total sebesar Rp176.648 ribu PPKA Khusus.</p>	BPR akan melakukan koreksi laporan bulanan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal <i>exit meeting</i> .	25/08/2024	BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 23 & 24 Agst 2024
12	Melakukan crash program terkait dengan laporan bulanan yang disampaikan dan memastikan untuk pelaporan posisi Agustus 2024 sudah benar seluruhnya.	BPR akan melakukan <i>crash program</i> terkait dengan laporan bulanan yang disampaikan dan memastikan untuk pelaporan posisi Agustus 2024 sudah benar seluruhnya.	30/09/2024	BPR telah menindaklanjuti hasil exit meeting tgl. 30 Nov 2024

Demikian Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan periode Tahun 2024.

PT BPR Metro Asia Mandiri

Di buat,



Nuniek Fenawati  
Direktur

Mengetahui,



Heryani  
Direktur Utama

**Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern**  
**BPR Metro Asia Mandiri**  
**Tahun 2024**

**I. Pendahuluan**

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.7/SEOJK 03/2016 tentang standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR. Berdasarkan SEOJK sebagaimana dimaksud, berikut laporan yang memuat pokok-pokok pelaksanaan audit PT. BPR Metro Asia Mandiri tahun 2024 berdasarkan pemahaman audit intern terhadap kondisi yang perlu diperhatikan.

**II. Ruang lingkup dan waktu pengerjaan**

Pokok-pokok pelaksanaan audit disusun berdasarkan pelaksanaan audit intern selama satu tahun yang mengacu pada kebijakan, aturan dan prosedur intern yang tertuang dalam SOP, Surat Keputusan, Surat Ederan maupun Memo Direksi serta kebijakan dan aturan ekstern yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan regulator lain yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Pelaksanaan audit dilakukan dengan waktu pelaksanaan setiap bulannya selama tahun 2024.

**III. Hasil Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga (DPK)**

**a. Komposisi Simpanan Dana Pihak Ketiga**

Berdasarkan jenis simpanan, deposito masih memiliki porsi terbesar sebagai sumber pendanaan hingga posisi Desember 2024. Simpanan pada dana murah yaitu tabungan disarankan untuk mengurangi beban bunga tinggi yang dikeluarkan oleh bank. Berikut adalah tabel komposisi DPK :

<b>Jenis Simpanan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Komposisi Simpanan (%)</b>	<b>Beban Bunga</b>
Tabungan	2.943.032.137	7,81 %	94.068.775
Deposito	34.735.036.674	92,19 %	2.190.876.072
<b>Total</b>	<b>37.678.068.811</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2.284.944.847</b>

**b. Komposisi Rekening Deposito Berdasarkan Jatuh Tempo**

Dilihat dari jumlah rekening deposito hingga posisi Desember 2024 berdasarkan jangka. Deposito dengan jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan merupakan komposisi rekening terbanyak, yaitu 66 dan 55. Berikut adalah tabel komposisi rekening berdasarkan jangka waktu :

Nilai Valuta			
Jangka Waktu	Jumlah	Rekening	Komposisi Rekening (%)
1 Bulan	93.321.293	3	0,27%
3 Bulan	6.349.056.311	35	18,28%
6 Bulan	20.849.912.441	66	60,03%
12 Bulan	7.442.746.629	55	21,43%
<b>Total</b>	<b>34.735.036.674</b>	<b>159</b>	<b>100,00%</b>

Dilihat dari komposisi keterkaitan pada deposito dengan jangka waktu 3 bulan, komposisi pihak tidak terkait lebih besar yaitu 77,81% dengan jumlah Rp.4.940.314.480 berikut adalah tabel komposisi keterkaitan pada deposito dengan jangka waktu :

Keterkaitan	Nilai Valuta		
	Jumlah	Rekening	Komposisi Rekening (%)
Terkait	1.408.741.831	13	22,19%
Tidak Terkait	4.940.314.480	22	77,81%
<b>Total</b>	<b>6.349.056.311</b>	<b>35</b>	<b>100,00%</b>

Komposisi keterkaitan ini berhubungan dengan potensi risiko pengalihan dana dan risiko likuiditas karena jumlah nasabah yang didominasi oleh nasabah pihak tidak terkait yang sangat sensitif terhadap daya saing nilai bunga yang ditawarkan oleh bank lain. Maka perlunya pelayanan prima untuk tetap mempertahankan nasabah potensial, selain itu disarankan untuk melakukan sebaran deposito dengan jangka waktu yang lebih panjang yaitu 12 bulan.

### c. Deposito 25 Terbesar

Dilihat dari potensi penarikan dana yang bersumber dari 25 besar deposito, jumlah rekening dalam satu nasabah dipecah menjadi sebaran dan banyak rekening. Risiko penarikan dana masih dapat teratasi dengan jatuh tempo yang berbeda disetiap rekening. Namun hal ini juga memunculkan potensi risiko penarikan dana secara masal, melihat rata-rata 25 besar depositan mendominasi dengan banyak rekening. Disarankan untuk melakukan pelayanan secara prima pada setiap nasabah khususnya nasabah potensial melakukan perluasan pasar pada nasabah-nasabah baru. Berikut adalah tabel nominal deposito 25 terbesar posisi Desember 2024:

Nominatif Simpanan Deposito 25 Terbesar		
Periode 31 Desember 2024		
No	Nama Nasabah	Deposito
1	MIMIE MARJANI	10.312.916.340
2	ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA	4.410.474.149
3	ROBY LASMANA	2.006.566.165
4	RONNY LASMANA	1.882.869.281
5	LEO SUTISNA	1.675.000.000
6	IRAWAN SETIADI	1.500.000.000
7	YENI HARTONO	1.500.000.000
8	HANDOYO LASMANA	1.135.662.063
9	SUROTO,BSC	1.117.500.000
10	TIO LIANG SAN	1.108.637.320
11	LUCKY TJANDRADINATA	1.080.000.000
12	SUGIH WIBOWO	825.400.000
13	RANDY AMON	702.272.244
14	VENNY SETIADI	600.000.000
15	ANDELA SUHERMAN	500.000.000
16	BUDI UNTUNG S	445.180.315
17	NOVITA KURNIAWATI LUKMAN	438.967.755
18	T.PATROBAS S	436.353.737
19	SHERRY SIERAWATI	370.000.000
20	EVIATY WIHARDJA	344.578.369
21	WIHANA TANUWIDJAYA	300.000.000
22	IAN SYARIF	280.101.050
23	WILHELMINA FRIEDA WOENGOE	268.884.144
24	DEDE SUTRISNA	257.709.405
25	DEDI GUNAWAN	218.847.313

#### d. Perkembangan Jenis Simpanan Tabungan

Berdasarkan data selama satu tahun terakhir, terjadi pertumbuhan pada jenis simpanan tabungan. Adanya perluasan pasar dengan produk tabungan terbaru yaitu Tabungan Mapan yang memberikan pertumbuhan sebesar 78,24%. Melihat pentingnya sebaran DPK pada dana murah, tabungan berjangka berpotensi dapat memberikan kontribusi nilai yang cukup signifikan terlihat dari jumlah rekening yang sangat sedikit namun dapat memberikan kontribusi penghimpunan dana yang cukup besar. Bank disarankan untuk dapat melakukan usaha pertumbuhan pada jenis simpanan tersebut, melihat tidak terjadi pertumbuhan dilihat secara jumlah rekening. Berikut adalah tabel perkembangan simpanan tabungan berdasarkan jenis tabungan selama satu tahun terakhir.

Jenis Tabungan	31/12/2023		31/12/2024		Up/Down	
	Jml. Rek	Saldo Akhir	Jml. Rek	Saldo Akhir		
Tabungan Aman	356	1.596.548.538	292	1.591.790.567	-4.757.971	-0,30
Tab Karyawan	51	1.069.177.544	55	970.939.595	-98.237.949	-9,19
Tab Mapan	3	38.864.757	6	178.595.889	139.731.132	359,53
Tabungan Aming	221	3.859.349	221	3.225.032	-634.317	-16,44
Tabungan Berkah	474	300.588.016	333	162.765.293	-137.822.723	-45,85
Tabungan Berkah 2	115	51.969.773	70	35.715.761	-16.254.012	-31,28

**e. Pertumbuhan DPK Terhadap Kredit**

Penghimpunan dana menunjukkan adanya penurunan dan penyaluran dana kedalam sektor perkreditan oleh bank menunjukkan adanya kenaikan. Bank telah melakukan langkah penyesuaian. Laju pertumbuhan DPK telah diupayakan ditahan agar bank tidak terbebani oleh beban bunga yang lebih besar dengan memperhatikan volume DPK yang terserap oleh kredit. Jika dilihat hanya secara komponen antara DPK dan KYD telah menyerap 71,47 % dari DPK pada posisi akhir tahun 2024. Berikut adalah tabel saldo akhir DPK dan KYD selama satu tahun terakhir :

Periode	31/12/2023	31/12/2024
DPK	43.927.334.441	37.678.068.811
KYD	24.842.319.946	26.929.868.167
<b>Selisih</b>	<b>19.085.014.495</b>	<b>10.748.200.644</b>

**IV. Hasil Pemeriksaan Kredit**

**a. Pertumbuhan Kredit**

Berdasarkan data selama satu tahun terakhir, laju pertumbuhan kredit mengalami kenaikan. Berdasarkan jenis penggunaannya kredit investasi dan kredit konsumtif menurun. Pertumbuhan kredit terjadi pada jenis penggunaan kredit modal kerja yang tumbuh 16,66% dan kredit karyawan 0,38%. Bank melakukan pengetatan pada penyaluran kredit dengan memperhatikan aspek resiko kredit terutama pada plafon kredit tinggi. Berikut adalah tabel kredit:

Penggolongan	31/12/2023			31/12/2024			Up/Down		
	Jml. Rek	Baki Debet	%	Jml. Rek	Baki Debet	%	Jml. Rek	Baki Debet	%
Kredit Modal Kerja	84	11.682.710.617	47,03%	100	16.168.278.583	60,04%	16	4.485.567.966	38,4%
Kredit Investasi	4	259.087.293	1,04%	2	189.333.370	0,70%	-2	-69.753.923	-26,92%
Kredit Konsumtif	885	12.186.326.410	49,05%	726	9.756.616.194	36,23%	-159	-2.429.710.216	-19,94%
Kredit Karyawan	20	714.195.626	2,87%	27	815.640.020	3,03%	7	101.444.394	14,2%

#### b. Perkembangan Kolektibilitas Kredit

Melihat perkembangan kredit berdasarkan kolektibilitas, NPL kredit mengalami penurunan. Berikut adalah tabel kolektibilitas kredit :

Kolektibilitas	31/12/2023		31/12/2024		Up/Down
	Jml. Rek	Baki Debet	Jml. Rek	Baki Debet	
L	517	15.494.606.078	257	16.310.918.807	816.312.729
DPK	78	2.217.736.803	42	1.151.056.788	-1.066.680.015
KL	35	708.211.783	24	334.114.583	-374.097.200
D	131	2.738.398.063	113	2.685.572.367	-52.825.696
M	230	3.683.367.219	419	6.448.205.622	2.764.838.403
<b>Total</b>	<b>991</b>	<b>24.842.319.946</b>	<b>855</b>	<b>26.929.868.167</b>	<b>2.087.548.221</b>
<b>NPL NETT</b>		<b>18,75%</b>		<b>15,98%</b>	<b>8,4%</b>

#### V. Hasil Pemeriksaan APU PPT

##### a. Pemeriksaan Transaksi Tunai

Berdasarkan pemeriksaan transaksi tunai selama bulan Desember 2024 terdapat 142 transaksi (Nominal Rp. 736.224.343), terdiri dari 139 transaksi (Nominal Rp. 727.873.343) kantor pusat MTC dan 3 transaksi (Nominal Rp. 8.351.000) kantor cabang Padalarang. Adapun transaksi kantor pusat MTC terdiri dari 75 transaksi setoran (Nominal Rp. 192.484.305) dan 60 transaksi penarikan dengan Nominal Rp. 535.389.038 (50 tarikan tabungan Rp. 533.613.005, 10 penarikan deposito Rp. 1.776.033). Transaksi kantor cabang Padalarang terdiri dari 3 transaksi penarikan tabungan dengan Nominal Rp. 8.351.000. Dari keseluruhan transaksi tersebut tidak ada transaksi tunai senilai 500 juta keatas.

**b. Pemeriksaan Transaksi Non Tunai**

Berdasarkan pemeriksaan transaksi non tunai selama bulan Desember 2024 terdapat 678 transaksi dengan nominal Rp. 16.037.530.916, terdiri dari 642 (Rp. 13.479.646.246) transaksi kantor pusat MTC dan 36 (Rp. 2.557.884.670) transaksi kantor cabang Padalarang. Adapun transaksi kantor pusat MTC terdiri dari 460 (Rp. 7.263.763.168) transaksi setoran/dana masuk antar bank dan 182 (Rp. 6.215.883.078) transaksi penarikan/pemindahbukuan antar bank. Transaksi kantor cabang Padalarang terdiri dari 30 (Rp. 2.543.260.966) transaksi setoran/dana masuk dan 6 (Rp. 14.623.704) transaksi penarikan/dana keluar. Dari keseluruhan transaksi tersebut tidak ada transaksi yang mencurigakan.

**VI. Pemeriksaan KTP Kadaluaarsa**

Berdasarkan data per akhir Desember 2024 terdapat 9 nasabah yang memiliki KTP kadaluaarsa. Berikut nasabah-nasabah tersebut :

No	CIF	Nomor KTP	Nama Nasabah	Alamat	Jns	Expire
1	0000066	10500301097	Andela Suherman	Jl. H. Moch. Mesri No.43 Bandung 2737010	KTP	01/09/2015
2	0000256	10500627106	Danny K Suhandia	Jl.ciung No.16 Rt 002 Rw 008 Bandung 61250	KTP	27/10/2015
3	0001210	10501468077	Delvine	Pasadena Jl.azalfa Blok A2-39a Bandung 963988	KTP	28/07/2015
4	0001474	10501125057	Dodi Sandra Nugraha	Jl.suryalaya Barat Iv No.14 Rt 01 Rw 04 Bandung 207703	KTP	25/05/2015
5	0000903	10502469077	Lina Dewi	Gg Wriadinata No 139 A/91 Bandung 160886	KTP	29/07/2013
6	0000109	10501515067	Maman Sulaeman	Jl.cadas Ngampar No.72-a/200 B Rt 005 Rw 009 Bandung 10	KTP	15/06/2008
7	0000230	10500908017	Mamat Rachmat	Binong Utara No.253/127b Rt 008 Rw 002 Bandung 320297	KTP	08/01/2012
8	0000032	10502209087	Mulyadi, S.si	Jl. Galaxi Raya No.92 Bandung 709635	KTP	09/08/2011
9	0000123	10502660076	Nining Puspitaningtyas	Batununggal Abadi Vi No.4 Rt 007 Rw 005 Bandung 41872	KTP	20/07/2015

**VII. Hasil Pemeriksaan Bagian Operasional BPR Selama Tahun 2024**

**a. Teller**

Teller temuan administratif : Tandatangan pada slip tidak lengkap, slip tidak ditemukan, bukti pembayaran belum di cap tanggal paraf, cap verifikasi tandatangan pada slip penarikan tidak dibubuhkan, penulisan slip salah, koreksi / coretan pada slip tidak diparaf, cap teller tidak dibubuhkan, salah kode perkiraan, mutasi teller tidak sesuai, laporan teller tidak lengkap / ditemukan.

**b. CS**

Temuan administratif : Salah penginputan data master deposito, penulisan aplikasi tidak lengkap, salah / kurang penginputan data master nasabah, salah penginputan data master tabungan, salah / kurang pada penulisan aplikasi, formulir klasifikasi tingkat resiko nasabah tidak ada.

**c. BO**

Temuan administratif: Tandatangan pada slip tidak lengkap, memo tidak ditemukan, bukti pembayaran tidak ditemukan, rincian hitungan angka pelunasan tidak sesuai, koreksi / coretan pada slip tidak diparaf, penginputan coa salah.

**d. Kredit**

Temuan administratif : Penginputan data master kredit tidak lengkap, persyaratan kredit tidak lengkap, salah penulisan pada PK, pengisian formulir pengajuan kredit tidak lengkap.

**VIII. Pemeriksaan TI**

No	IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI (TI)	Ceklist	Keterangan
1	Ruang lingkup TI berupa Aplikasi Inti Perbankan dan Pusat Data (BPR Mdl Inti < 50M) & Pusat Pemulihan Bencana (BPR Modal Inti ≥ 50 M)	<input checked="" type="checkbox"/>	- Aplikasi inti perbankan menggunakan IBS dari Vendor USSI, Pusat data terdapat di kantor pusat PT. BPR Metro Asia Mandiri, juga di PT. USSI. Server cadangan ditempatkan di kantor pusat BPR Metro Asia Mandiri
2	BPR menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia dgn karakteristik risiko yg berbeda	<input checked="" type="checkbox"/>	- Pusat data terdapat di 2 lokasi yaitu di Kantor pusat PT. BPR Metro Asia Mandiri dan di PT. USSI
3	Melakukan rekam cadang ( <i>back up</i> ) data aktivitas yang diproses menggunakan Teknologi Informasi	<input checked="" type="checkbox"/>	- Rekam cadang ( <i>back up</i> ) dilakukan per hari dalam hari kerja pada sisi server pusat dan server cadangan
4	Memiliki <i>installer</i> Aplikasi Inti Perbankan yang digunakan BPR untuk melakukan <i>install</i> ulang.	<input checked="" type="checkbox"/>	- PT. BPR Metro Asia Mandiri memiliki aplikasi <i>installer core banking</i> untuk melakukan <i>install</i> ulang
5	Aplikasi Inti Perbankan telah menerapkan ketentuan peraturan perundangundangan bagi BPR; kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif, batas maksimum pemberian kredit, batas maksimum penyaluran dana, standar akuntansi, dan pelaporan masing-masing.	<input checked="" type="checkbox"/>	- Aplikasi inti perbankan telah memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan bagi BPR.
6	Melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor: pada hari yg sama (BPR tdk memiliki ATM, Electronic Banking) & Real Time bagi BPR memiliki ATM &	.	- Pencatatan transaksi antar kantor dilakukan oleh aplikasi inti perbankan secara <i>real</i>

	Electronic Banking		<i>time</i>
7	Menghasilkan data dan informasi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan laporan untuk kebutuhan intern dan ekstern, seperti laporan bulanan, laporan batas maksimum pemberian kredit atau laporan batas maksimum penyaluran dana, laporan keuangan publikasi, dan rencana bisnis BPR serta laporan sistem informasi debitur/sistem layanan informasi keuangan bagi BPR	<input checked="" type="checkbox"/>	- Aplikasi inti perbankan menyediakan aplikasi pendukung untuk pelaporan rutin seperti laporan bulanan, laporan OBOX, laporan SLIK dan lainnya.
8	Mengonsolidasikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam Aplikasi Inti Perbankan untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	<input checked="" type="checkbox"/>	- Terdapat beberapa fungsi yang mendukung bank untuk penyediaan data
9	Mampu mengimplementasikan profil nasabah secara terpadu (Single Customer Identification File), data profil nasabah yang meliputi seluruh rekening yang dimiliki oleh satu nasabah pada suatu BPR dan BPRS antara lain tabungan, deposito, dan kredit atau pembiayaan dalam rangka melaksanakan ketentuan APU PPT.	<input checked="" type="checkbox"/>	- Aplikasi inti perbankan dapat mengimplementasikan profil nasabah secara terpadu melalui menu pengelolaan nasabah
10	Vendor TI melakukan rekam cadang data aktivitas dan memiliki <i>installer</i> Aplikasi Inti Perbankan	<input checked="" type="checkbox"/>	- PT. USSI selaku vendor memiliki aplikasi <i>installer</i> dan rekam cadang data
11	Data aktivitas BPR wajib disimpan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	- Rekam cadang data dilakukan per interval 10 tahun
12	Mengonsolidasikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam Aplikasi Inti Perbankan untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, seperti data nasabah, CIF, Profil Risiko, Kolektibilitas, Account Maintenance, dll	<input checked="" type="checkbox"/>	- Aplikasi inti perbankan telah menyediakan fasilitas seperti pengolahan data nasabah dan kolektibilitas
13	Pengembangan dan pengadaan Aplikasi Inti Perbankan BPR atau BPRS dengan menggunakan penyedia Aplikasi Inti Perbankan telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis.	<input checked="" type="checkbox"/>	- Pengadaan aplikasi inti perbankan berdasarkan perjanjian tertulis dengan vendor terkait
14	TIDAK melakukan kegiatan penyediaan jasa Teknologi Informasi kepada pihak lain, kecuali terkait dengan produk dan layanan yang disediakan oleh BPR yakni penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dalam bentuk hardware, software, dan/atau fasilitas pendukung Teknologi Informasi, antara lain Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, jaringan komunikasi, dan/atau perangkat elektronik lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana oleh BPR	<input checked="" type="checkbox"/>	- Bank hanya berfokus pada pengembangan terkait produk yang ada pada BPR dan tidak melakukan pengembangan pada selain dari produk yang ada pada BPR

15	Pengembangan dan pengadaan Aplikasi Inti Perbankan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan SPO Teknologi Informasi Bab 5 Tentang Penyelenggaraan TI dgn bekerjasama dgn vendor TI	<input checked="" type="checkbox"/>	- Pengembangan dan pengadaan aplikasi inti perbankan telah sesuai dengan SOP terbaru yang diterbitkan OJK
16	Tindak lanjut atas realisasi penjanjian kerjasama tsb mencakup ; a.Antisipasi Risiko, b.Tindak lanjut risiko, c.Rencana darurat, d.Rencana Pemulihan Bencana, e.Jaminan keberlangsungan penyelenggaraan TI	<input checked="" type="checkbox"/>	-
17	Pengamanan penyelenggaraan TI dilakukan; a.Kerahasiaan, b.Integritas, c.Ketersediaan	<input checked="" type="checkbox"/>	- Pengamanan penyelenggaraan TI dilakukan atas kerahasiaan, integritas dan ketersediaan
18	Standar pengamanan penyelenggaraan TI berdasarkan faktor2 berikut : 1) standar password; 2) standar enkripsi; 3) standar pengamanan server; 4) standar pengamanan perangkat jaringan; 5) standar pengamanan end-point atau komputer; 6) standar logging; dan 7) standar pengamanan aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/>	- BPR telah melakukan pengamanan penyelenggaraan TI seperti standar password pada aplikasi inti perbankan, pengamanan ruang server beserta perangkatnya
19	Standar penyelenggaraan TI telah dilakukan dengan standar prosedur pengendalian akses; penggunaan password, otentikasi, penggantian PIN secara berkala, menonaktifkan apabila cuti, tdk msk, session time out, expiration interval, dll	<input checked="" type="checkbox"/>	- Prosedur pengendalian akses telah dilakukan yang meliputi penggunaan password, otorisasi, menonaktifkan akun yang sudah tidak digunakan oleh yang bersangkutan, pembatasan hak akses menu, serta pembatasan nominal transaksi setiap bagian
20	Standar TI memberikan dukungan proses operasional secara efektif dan efisien; Kemudahan SIM, proses pembukuan, penanganan data SDM, Pembukaan rek, persiapan PK, Pemberitahuan angsuran jth tempo, dll	<input checked="" type="checkbox"/>	- Aplikasi inti perbankan belum dapat melakukan beberapa dukungan proses operasional seperti yang disebutkan
21	Standar TI memberikan dukungan proses bisnis secara efektif dan efisien; kemudahan marketing mendapatkan data nasabah lengkap, menggunakan no hp, email sbg sarana komunikasi, memonitor angsuran, deposito jth tempo lebih dini, analisa kredit by sistem, dll	<input checked="" type="checkbox"/>	- Aplikasi inti perbankan dapat menampilkan informasi terkait data nasabah beserta data fasilitas kredit dan agunannya
22	Penggunaan core banking system telah sesuai dengan kebutuhan BPR dan memberikan kemudahan dalam operasional	<input checked="" type="checkbox"/>	- Sebagian besar aplikasi inti perbankan telah memberikan kemudahan dalam operasional

23	Manajemen Bank telah melaporkan rencana pengembangan atau pengadaan TI baru dalam Rencana Bisnis Bank 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	- Manajemen bank telah menyampaikan rencana pengembangan TI dalam rencana bisnis bank
24	Manajemen Bank telah menetapkan standar pengelolaan data base dalam SPO TI	<input checked="" type="checkbox"/>	- Manajemen bank membuat SOP terkait pencadangan dan pengamanan data
25	SPO Pengelolaan TI telah mengatur tentang jaringan komunikasi, desain, kapasitas, media, rekam cadang, pengamanan fisik, pemantauan, tersedianya jejak audit	<input checked="" type="checkbox"/>	- Pengelolaan TI dijalankan sesuai dengan SPO
26	Pengelolaan TI telah dilengkapi dengan Rencana Pemulihan Bencana, Rekam Cadang data,	<input checked="" type="checkbox"/>	- PT. BPR Metro Asia Mandiri telah mengadakan <i>Disaster Recovery Cente</i> yang ditempatkan di Kantor Pusat sehingga apabila terjadi kerusakan pada pusat data terdapat back up rekam cadang data
27	Pengelolaan TI telah mengatur Rencana Kelanjutan Bisnis yang mencakup tindak lanjut apabila terjadi bencana	<input checked="" type="checkbox"/>	- Terdapat tindak lanjut apabila terjadi bencana diantaranya pengadaan <i>Disaster Recovery Center</i> , menyiapkan sumber listrik cadangan apabila terjadi pemadaman, dan juga <i>back up data</i> di beberapa lokasi guna menghindari kehilangan data utama.

## VII. Daftar Rasio Keuangan

Penggolongan	31/12/2023	31/12/2024	Up/Down
	%	%	%
Rasio KPMM	37,20	32,60	-4,6
Rasio Modal Inti thd Keseluruhan Modal	98,93	64,50	-34,43
Rasio Modal Inti thd Aset Produktif Bermasalah	100,19	51,09	-49,1
Rasio Kualitas Aset Produktif	12,45	20,00	7,55
Rasio PPAP thd PPAP Wajib Dibentuk	100,00	100,00	0
Rasio NPL Neto	18,75	15,98	-2,77
Rasio NPL Gross	28,70	35,16	6,46
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	47,47	57,94	9,98
Rasio Return on Assets	-0,98	-6,29	-5,31
Rasio Net Interest Margin	18,52	7,83	-10,69
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	106,93	136,41	29,48

Cash Ratio	11,67	13,14	1,47
Loan to Deposit Ratio	48,40	61,67	13,27
Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	10,01	11,10	2,41
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit	47,03	60,04	13,75
Rasio Realisasi Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Total Dana Pendidikan dan Pelatihan yang Dianggarkan	124,41	81,08	-39,95

## VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Deposito masih memiliki porsi terbesar sebagai pendanaan DPK. Deposito dengan jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan merupakan komposisi rekening terbanyak. Rata-rata 25 besar deposan mendominasi dengan banyak rekening. Adanya perluasan pasar dengan produk Tabungan Berkah. Jika hanya dilihat secara komponen antara DPK dan KYD hanya menyerap 71,47% dari DPK pada posisi akhir tahun 2024.
- Laju pertumbuhan kredit terjadi penurunan pada jenis penggunaan kredit investasi dan kredit konsumtif. NPL kredit mengalami kenaikan. Tindak lanjut pemeriksaan OJK Tahun 2024 yang deadline Tahun 2024 telah semua ditindaklanjuti.
- Dari keseluruhan transaksi tunai tidak ada transaksi senilai 500 juta keatas. Dari keseluruhan transaksi non tunai tidak ada transaksi yang mencurigakan. Pemeliharaan KTP kadaluarsa telah di follow up kepada nasabah.
- Hasil pemeriksaan operasional Teller, CS, Admin Kredit, BO merupakan temuan yang bersifat administratif.
- Sistem TI yang sudah berjalan cukup memberikan dukungan dalam pekerjaan.

## IX. Tanggapan Pihak Manajemen

Pelaksanaan audit bertujuan untuk dapat membantu perusahaan untuk mencapai misi dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dengan menilai dan memperbaiki efektivitas manajemen resiko, kontrol dan proses kepatuhan peraturan dan hukum. Internal audit yang baik membantu menunjukkan kinerja perusahaan yang sebenarnya dan bisa menjadi tolak ukur kesehatan perusahaan. Bagian Audit Internal untuk kedepannya menjadi sumber masukan independen dan objektif kepada Direksi dan Pemilik untuk memastikan keabsahan, legalitas dan pencapaian tujuan.

- Dari keseluruhan transaksi tunai tidak ada transaksi senilai 500 juta keatas. Dari keseluruhan transaksi non tunai tidak ada transaksi yang mencurigakan. Pemeliharaan KTP kadaluarsa telah di follow up kepada nasabah.
- Hasil pemeriksaan operasional Teller, CS, Admin Kredit, BO merupakan temuan yang bersifat administratif.
- Sistem TI yang sudah berjalan cukup memberikan dukungan dalam pekerjaan.

#### IX. Tanggapan Pihak Manajemen

Pelaksanaan audit bertujuan untuk dapat membantu perusahaan untuk mencapai misi dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dengan menilai dan memperbaiki efektivitas manajemen resiko, kontrol dan proses kepatuhan peraturan dan hukum. Internal audit yang baik membantu menunjukkan kinerja perusahaan yang sebenarnya dan bisa menjadi tolak ukur kesehatan perusahaan. Bagian Audit Internal untuk kedepannya menjadi sumber masukan independen dan objektif kepada Direksi dan Pemilik untuk memastikan keabsahan, legalitas dan pencapaian tujuan.

Bandung, 21 Januari 2025

Dibuat,



Niken Sari Narulita

Audit Internal

Menyetujui,



Heryani

Direktur Utama



Nuniek Fenawati

Direktur

Mengetahui,



Roby Lasmana

Komisaris Utama



Clarissa Wijaya

Komisaris